



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMRI YULIHARDI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 157100

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.635.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/36 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 390 m2/294 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 1.025.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/264 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **291.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, WARISAN Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2009, HIBAH TANPA AKTA Rp. 86.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **208.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **272.955.236**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 4.406.955.236

III. HUTANG

Rp. 350.033.217

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.056.922.019

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.